

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DISERTAI PERSETUBUHAN, STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 519/PID.B/2021/PN JKT.PST DAN
NOMOR 136/PID.B/2021/PN.OLM.**

TESIS

Oleh:
Yogi Iskandar
201920251003



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA JAKARTA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak
Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan, Studi
Kasus Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
dan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm.

Nama Mahasiswa : Yogi Iskandar
Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251003
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, Januari 2023
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. MS. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA.
NIDN: 0304065402


Dr. Sugeng, S.H. M.H.
NIDN : 0304027301

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak
Pidana Pembunuhan Disertai Persetujuan, Studi
Kasus Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst
dan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm.

Nama Mahasiswa : Yogi Iskandar
Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251003
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 3 Februari 2023

Bekasi, 3 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. MS. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA.
NIDN: 0304065402

Penguji I : Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN: 0319046403

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, S.H. M.H.
NIDN : 0316077604

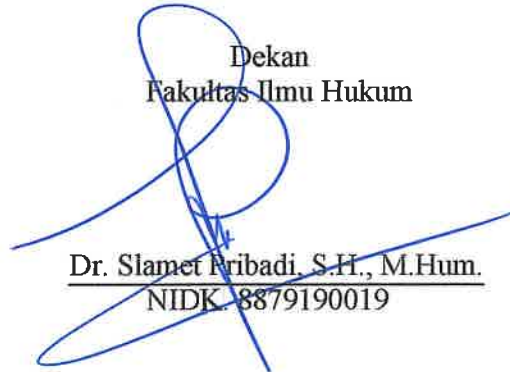
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum



Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan, Studi Kasus Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst dan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm.”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Yogi Iskandar
201920251003

ABSTRAK

Pembuktian tindak pidana pemerkosaan harus memenuhi unsur barangsiapa dan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pembuktian ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman pada alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP. Kasus pemerkosaan yang terjadi sekarang ini, tidak jarang disertai juga dengan kasus pembunuhan bahkan pelaku menyetubuhi korban yang sudah meninggal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana penerapan pengaturan sanksi atas perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan dengan orang meninggal? dan bagaimana upaya hukum atas tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan pada orang meninggal, sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan bagi keluarga korban?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap pembunuhan disertai persetubuhan pada orang yang sudah meninggal tidak dituntut dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebabkan pelaku perkosaan mayat sulit dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan tidak adanya pasal yang secara tegas mengatur mengenai persetubuhan/perkosaan terhadap mayat, sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan hukum dimaksud adalah karena tidak adanya aturan normatif dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tindakan persetubuhan/perkosaan terhadap mayat mengingat di dalam suatu perbuatan pidana dan dalam praktiknya, pelaku hanya dikenakan dalam pasal pembunuhan saja ditambah lagi, tidak satupun hakim yang membuat atau melahirkan yurisprudensi untuk tindak pidana ini, padahal tindak pidana ini sangatlah tidak manusiawi dan sadis. Hukum Indonesia belum mengatur secara jelas delik persetubuhan/ pemerkosaan terhadap mayat. Jadi, persetubuhan terhadap mayat bukanlah suatu tindak pidana pemerkosaan. Hal yang menjadi masalah besar adalah pelaku pemerkosaan atau yang menyetubuhi mayat lolos dari jerat hukum karena di KUHP tidak ada pasal yang mengatur hukuman untuk pelaku pemerkosa dan yang menyetubuhi mayat. Meskipun perbuatan menyetubuhi mayat bukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pada prespektif hukum yang akan datang *ius constituendum* hal tersebut sudah terakomodir yakni dengan adanya norma larangan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan disertai persetubuhan terhadap orang yang meninggal secara tidak beradab dan manusiawi.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, Persetubuhan.

**Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
Disertai Persetubuhan, Studi Kasus Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN
Jkt.Pst dan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm**

Yogi Iskandar

Faculty of Law, Bhayangkara Jaya University, Jakarta, Indonesia
yogieiskandar8890@gmail.com

Abstract

Proof of the crime of rape must meet the elements of whoever and the element of violence or threats of violence force a woman who is not his wife to have sex with him as stipulated in Article 285 of the Criminal Code. Proof of whether there is a criminal act of rape is guided by the evidence provided for in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Cases of rape that are happening now, are often accompanied by cases of murder and even perpetrators have intercourse with victims who have died. The problems discussed in this study, namely: how is the application of sanctions arrangements for the actions of the perpetrators of the crime of murder accompanied by intercourse with the deceased? and what are the legal remedies for the criminal act of murder accompanied by intercourse for the deceased, so that it can create a sense of justice for the victim's family?

The research method used in this study is a normative juridical research method. The materials studied are primary, secondary and tertiary legal materials.

*The results of the study show that legal arrangements for murder accompanied by intercourse with a deceased person are not prosecuted in the public prosecutor's indictment because perpetrators of corpse rape are difficult to be charged with the articles in the Criminal Code and there are no articles that explicitly regulate intercourse/rape of corpses, so that this creates a legal vacuum. The legal vacuum referred to is due to the absence of normative rules in positive law in Indonesia which regulate acts of intercourse/rape of corpses considering that in a criminal act and in practice, the perpetrator is only charged in the murder article plus, there is no judge who makes or creates jurisprudence for this crime, even though this crime is very inhumane and sadistic. Indonesian law does not yet clearly regulate the offense of intercourse/rape against a corpse. So, intercourse with a corpse is not a criminal act of rape. The thing that is a big problem is that the perpetrators of rape or those who call corpses escape the law because in the Criminal Code there are no articles that regulate punishment for rapists and those who have intercourse with corpses. Even though the act of intercourse with a corpse is not a crime of rape as regulated in Article 285 of the Criminal Code. In the future legal perspective, *ius constituendum*, this has been accommodated, namely by the existence of a prohibition norm for anyone who commits the crime of murder accompanied by sexual intercourse with a person who dies in an uncivilized and humane way.*

Keywords: Criminal Sanctions, Murder Offenders, Intercourse.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan campur tangannya dengan keajaiban limpahan rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Judul tesis yang penulis ambil adalah **“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan, Studi Kasus Putusan Nomor 519/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst dan Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm”**.


Penulis menyadari sepenuhnya tesis ini jauh dari sempurna, penyusunan tesis ini tidak dapat berjalan tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Prof. Dr. MS. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA, selaku Pembimbing I materi tesis yang telah banyak memberikan arahan, perhatian serta koreksi yang membangun sehingga penulis bisa lebih memahami untuk menulis sebuah tesis yang baik dan benar.

5. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H., selaku Pembimbing II materi tesis yang telah banyak memberikan arahan, perhatian serta koreksi yang membangun sehingga penulis bisa lebih memahami untuk menulis sebuah tesis yang baik dan benar.
6. Bapak/Ibu selaku Guru Besar dan seluruh Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu, pemahaman dan perhatiannya.
7. Seluruh karyawan dan staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu dalam birokrasi dan informasi sehingga penyusun tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Segenap Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Keluarga yang selalu memberikan dukungan, dorongan, semangat dan inspirasi setiap saat sehingga selesainya tesis ini.
10. Teman-teman yang selalu memberikan bantuan, semangat dan inspirasi setiap saat hingga selesainya tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang namanya tidak dapat saya tuliskan satu persatu, dan permohonan maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan selama proses pengerjaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Semoga kita selalu berada dalam suasana hati yang senang tanpa selalu berkeluh putus asa. Sekian dan terima kasih.

Jakarta, Februari 2023



(Yogi Iskandar)

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Perumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Teori Tindak Pidana Pembunuhan	20
B. Teori Tindak Pidana Persetubuhan	33
C. Teori Pemidanaan	36
D. Sanksi Pidana	53
E. Teori Keadilan	59
BAB III. HASIL PENELITIAN	68
A. Kasus Posisi	68

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 519/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst.....	68
2. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm.	72
B. Pertimbangan Hukum Hakim	86
1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 519/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst.....	86
2. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm.	98
C. Amar Putusan	109
1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 519/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst.....	109
2. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 136/Pid.B/2021/PN.Olm.	110
BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	115
A. Penerapan Pengaturan Sanksi atas Perbuatan Pelaku Tindak Pidana pembunuhan Disertai Persetujuan dengan Orang Meninggal	115
B. Upaya Hukum atas Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetujuan pada Orang Meninggal sehingga dapat Menimbulkan Rasa Keadilan Bagi Keluarga Korban	124
BAB V. PENUTUP	132
A. Simpulan	132
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pemidanaan terhadap Pelaku Persetubuhan terhadap Mayat di Beberapa Negara	117
--	-----

